

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY
(STUDI APBD KABUPATEN SUMBAWA)**

Subhan Purwadinata¹, Ismawati², Nur Elmiati³

1. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*
2. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*
3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email :

subhanpurwadinata@universitas-samawa.ac.id,
ismawati@universitas-samawa.ac.id

Abstrak

The purpose of this study was to know the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Sumbawa District using the principle of value for money, namely economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. The type of data used in this study was quantitative data obtained from existing secondary sources and collected using documentation techniques. The data that has been collected was analyzed using value for money analysis techniques which were measured based on economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. The results of study showed that the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Sumbawa District if viewed from the economic level in fiscal year of 2010-2018 was got fluctuated and was categorized as economic, due to the economic ratio level was of less than 100%. If seen from the level of efficiency in fiscal year of 2010-2018 it was categorized as efficient and inefficient, because the efficiency ratio was less than 100%. If seen from the level of effectiveness in fiscal year of 2010-2018 it was categorized as effective and ineffective because the effectiveness ratio was more than 100% and some were less than 100%.

Keywords: *Regional Government Performance, Value For Money, Economic Ratios, Efficiency Ratios, Effectiveness Ratios.*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Hak otonomi daerah memberikan kebebasan masing-masing daerah di Indonesia atau organisasi sektor publik lainnya untuk mengolah dan meningkatkan kinerjanya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Halim (2001) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Hal ini memiliki makna bahwa daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun kinerja yang baik. Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.

Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Hal ini bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep *value for money* sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Implementasi konsep *value for money* akan memberi manfaat untuk menilai efektifitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Tiga elemen utama dari konsep *value for money*, yaitu ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Elemen yang kedua adalah efisiensi, yaitu pencapaian *output* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Elemen ketiga adalah efektifitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerahnya, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa.

Kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Sumbawa adalah aspek yang banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini, hal itu dikarenakan pada pengelolaannya banyak terjadi permasalahan. Permasalahan keuangan yang dihadapi di kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah (PD), dan fluktuasi tingkat realisasi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga tahun 2018, demikian pula dengan realisasi anggaran belanja daerah. Realisasi belanja masih dibawah total anggaran yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan (BPS, 2019).

Kabupaten Sumbawa mendapat tujuh kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan. Namun, predikat WTP itu belum menjamin bahwa struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah benar-benar transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi APBD Kabupaten Sumbawa).

KAJIAN PUSTAKA

Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Untuk dapat mengukur tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Mahmudi, 2013).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran guna menilai prestasi kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 memuat bahwa Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD. Ruang lingkup LKPJ meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Secara umum, penyusunan LKPJ bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu, dan untuk mengetahui peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD.

Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E.

Mahmudi (2013) mengemukakan bahwa *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Haryanto (2007), manfaat implementasi konsep *value for money* pada pemerintah, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik, yaitu: ekonomis (hemat cermat), efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna). langkah-langkah pengukuran *value for money* adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang dipergunakan. Rasio ekonomis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis
- Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis
- Jika $x = 100\%$ berarti ekonomis seimbang.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika $x < 100\%$ berarti efisien
- Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien
- Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang.

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasio efektifitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x > 100\%$ berarti efektif

Jika $x < 100\%$ berarti tidak efektif

Jika $x = 100\%$ berarti efektifitas seimbang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itu sendiri yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (UU. No. 17 tahun 2003):

1. Pendapatan daerah, yaitu semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.
2. Belanja daerah, yaitu semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer, yaitu penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, pemerintah daerah menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menerima penyerahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh pemerintah daerah untuk disetujui. Setelah pemerintah daerah menyetujui PPAS, selanjutnya disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya (Sugiyono, 2016). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2018 yang diukur menggunakan indikator *value for money*.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan arsip pada bagian keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoretis untuk melakukan pembahasan

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang sudah ada (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini berupa laporan APBD dan laporan realisasi APBD pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan yang kemudian diklasifikasikan dan dianalisis (Sugiyono, 2016). Teknik analisis kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa diukur menggunakan model yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009), yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran rasio ekonomis dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis

Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $x = 100\%$ berarti ekonomis seimbang.

2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti efisien

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien

Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang.

3. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x > 100\%$ berarti efektif

Jika $x < 100\%$ berarti tidak efektif

Jika $x = 100\%$ berarti efektivitas seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2018 yang diukur menggunakan indikator *value for money*. Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2018 diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Rasio Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2018

Tahun	Ekonomis (%)	Kriteria	Efisiensi (%)	Kriteria	Efektivitas (%)	Kriteria
2010	92,25%	Ekonomis	100,97%	Tdk efisien	99,57%	Tidak efektif
2011	90,67%	Ekonomis	95,39%	Efisien	99,68%	Tidak efektif
2012	94,63%	Ekonomis	100,38%	Tidak efisien	102,25%	Efektif
2013	91,65%	Ekonomis	98,89%	Efisien	98,05%	Tidak efektif
2014	88,50%	Ekonomis	92,22%	Efisien	101,14%	Efektif
2015	91,52%	Ekonomis	101,90%	Tidak efisien	99,06%	Tidak efektif
2016	94,39%	Ekonomis	97,34%	Efisien	104,31%	Efektif
2017	0,081%	Ekonomis	97,34%	Efisien	0,090%	Tidak efektif
2018	94,94%	Ekonomis	104,96%	Tidak efisien	98,38%	Tidak efektif
Jumlah	738,631%		889,39%		804,53%	
Rata-rata	82,07%	Ekonomis	98,82%	Efisiensi	89,39%	Tidak Efektif

Sumber: Data Penelitian Yang Dioleh, 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2010 hingga 2018 berada pada kriteria ekonomis dengan nilai rata-rata sebesar $82,07\% < 100\%$. Hasil pengukuran kinerja menggunakan indikator efisiensi berada pada kriteria efisien dengan nilai rata-rata sebesar $98,82\% < 100\%$, meskipun nilai efisiensi dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Dan pengukuran kinerja menggunakan indikator efektivitas berada pada kriteria tidak efektif dengan nilai rata-rata $89,39 < 100\%$, meskipun pada beberapa tahun memperoleh kinerja yang efektif.

Pembahasan

Akuntansi sektor publik dapat berperan untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) atau yang dikenal dengan *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya penghargaan atas setiap rupiah uang publik dengan cara memanfaatkannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan *value for money* didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis tahun 2010-2018 berada pada kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik pemerintah Kabupaten Sumbawa. Artinya, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi realisasi program berada pada kriteria efektif, meskipun nilai efisiensi realisasi program dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Kriteria efisien menunjukkan kinerja yang baik pemerintah Kabupaten Sumbawa. Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dengan *output*. Artinya, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mampu memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan baik untuk melaksanakan program atau kegiatan pemerintahan.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efektivitas realisasi program berada pada kriteria tidak efektif, meskipun pada beberapa tahun memperoleh kinerja yang efektif. Kriteria tidak efektif menunjukkan kinerja yang tidak baik pemerintah Kabupaten Sumbawa. Artinya, pemerintah Kabupaten Sumbawa belum maksimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kinerja keuangan yang harus di perbaiki untuk memenuhi prinsip *value for money* untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan guna kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat ikut serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani (2012) tentang pengukuran kinerja dengan prinsip *value for money* pemerintah Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomi tahun

2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ekonomis dalam merealisasikan pengeluaran karena rasionya kurang dari 100%. Rasio efisiensi tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Rasio efektifitas tahun 2005 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu secara umum efektif karena hasil rasio nya lebih dari 100%. Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ditinjau dari konsep *value for money* sudah baik karena telah memenuhi ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2018 belum memenuhi kriteria *value for money*, yaitu ekonomis, efisien dan efektif. maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa belum mampu Penerapan konsep *value for money* melalui tiga elemen, yaitu:

1. Indikator ekonomis pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mencapai kinerja yang baik dan ekonomis. Pemerintah telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik.
2. Indikator efisiensi kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mencapai kinerja yang baik dan efisien. Pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.
3. Indikator efektifitas pada pemerintah Kabupaten Sumbawa belum mencapai kinerja yang baik dan tidak efektif. Pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah harus dapat mengendalikan belanja yang dikeluarkan sesuai nominal yang telah dianggarkan. Pemerintah perlu meminimalisir pengeluaran yang tidak produktif, terutama pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik.
2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Pemerintah harus memperluas lapangan kerja agar kualitas dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat dapat meningkat.
3. Peneliti mengharapkan ada penelitian selanjutnya dari pihak lain menggunakan beberapa model analisis lainnya sebagai bahan perbandingan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sri. 2012. Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Akuntansi El Muhasabah*. Vol. 3 No. 1. Hal. 1-22.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka*. Sumbawa: BPS.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Haryanto, Sahrudin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.